



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Bandung 40294 Tlp.022-7810365 Fax.022-7810349
Homepage : www.pta-bandung.go.id E-Mail : surat@pta-bandung.go.id
BANDUNG

Nomor : W10-A/5309 /KU.00/XII/2019
Lampiran : -
Hal : **Usulan RKAKL 2021**

19 Desember 2019

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 5448/DJA1/KU.00/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami minta agar Saudara segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) TA 2021, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Satuan kerja agar menyusun RKA K/L DIPA 04 TA 2021 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Realisasi capaian kinerja dan anggaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Usulan Pembebasan Biaya Perkara :
 - 1) Penghitungan besaran nilai satuan biaya pembebasan biaya perkara sesuai dengan kondisi riil masing-masing Pengadilan Agama;
 - 2) Dalam penentuan target memperhatikan jumlah perkara prodeo diterima dan realisasi kinerja pembebasan biaya perkara 3 tahun terakhir. Data tersebut harus dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR);
 - c. Usulan Sidang di Luar Gedung Pengadilan :
 - 1) Penentuan lokasi pelaksanaan dan jumlah personil tim pelaksana sidang di luar gedung Pengadilan harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
 - 2) Usulan alokasi anggaran perjalanan dinas tim/petugas sidang di luar gedung Pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
 - 3) Usulan alokasi anggaran belanja sewa dan belanja bahan dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan;

d. Usulan Sidang Terpadu

- 1) Satker yang mengajukan usulan kegiatan Sidang Terpadu diharapkan sudah terjalin hubungan kerjasama dengan Pemda maupun KUA;
- 2) Usulan alokasi anggaran perjalanan dinas tim/petugas sidang di luar gedung Pengadilan/Sidang Terpadu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
- 3) Usulan alokasi anggaran belanja bahan dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan;

e. Usulan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

- 1) Menghitung kebutuhan jumlah jam layanan Posbakum selama satu tahun dengan estimasi pelaksanaan dimulai pada awal tahun anggaran;
 - 2) Dapat dialokasikan honorarium pejabat/panitia pengadaan barang/jasa;
2. Usulan anggaran dan target kinerja dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan format sebagaimana terlampir, serta dilakukan penginputan ke dalam aplikasi RKAK/L Tahun 2020 kemudian membuat Data Arsip Komputer (ADK) melalui Backup pada *utility*;
3. TOR, RAB dan ADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat paling lambat tanggal 26 Desember 2019 melalui email : ptabandungperencanaan@gmail.com.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil. Ketua



H. Empud Mahpudin

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Jakarta;